

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI
MANGROVE DI KAWASAN EKOWISATA LUPPUNG
KABUPATEN BULUKUMBA**

**COMMUNITY PARTICIPATION IN CONSERVATION
MANGROVE IN LUPPUNG ECO-TOURISM AREA
BULUKUMBA REGENCY**

Eka Aprilya Handayani¹ dan Asti Sugiarti¹

¹Dosen Program Studi Penangkapan Ikan, Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan,
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Correspondence Author: ekaapriya9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung Kabupaten Bulukumba. Partisipasi masyarakat dirumuskan dalam bentuk pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem mangrove, serta alternatif strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode survei melalui kuesioner, observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan responden penelitian menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu dengan *purposive sampling* yang meliputi masyarakat, pemilik usaha di kawasan ekowisata, dan pihak pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove terhadap 4 kriteria pengelolaan ekowisata mangrove yaitu, pengetahuan, sosialisasi, penyuluhan, dan kerja sama memperoleh skor 3,7 dikategorikan sedang. Untuk pemeliharaan ekosistem mangrove terhadap 5 kriteria yaitu kepedulian, keterlibatan, keterampilan, pendapatan, dan kepercayaan memperoleh skor 4,5 dikategorikan baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove terkategori baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (restorasi). Partisipasi masyarakat juga didukung oleh beberapa lembaga yang bekerja sama seperti Kelompok Tani Hutan Mangrove, Karang Taruna, Pemerintah Desa Manyampa, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, konservasi mangrove, ekowisata.

ABSTRACT

This study aims to analyze community participation in mangrove conservation in the Luppung ecotourism area, Bulukumba Regency. Community participation is formulated in the form of managing and maintaining mangrove ecosystems, as well as alternative strategies for community involvement in the sustainable development of mangrove conservation. This study uses descriptive analysis with survey methods through questionnaires, direct observation, interviews, and documentation. Determination of research respondents using non-probability sampling technique, namely by purposive sampling which includes the community, business owners in ecotourism areas, and the government. The results showed that community participation in mangrove conservation on 4 criteria for managing mangrove ecosystems, namely, knowledge, socialization, counseling, and cooperation obtained a score of 3.3 in the medium category. For the maintenance of mangrove ecosystems against 5 criteria, namely caring, involvement, skills, income, and trust, the score is 4.5 categorized as good. Community participation in mangrove forest management is relatively high from the aspect of planning and implementing activities (restoration). Community participation is also supported by

several collaborating institutions such as the Mangrove Forest Preservation Group, Youth Organizations, the Manyampa Village Government, the Bulukumba District Fisheries and Marine Service, and the Bulukumba District Forestry and Environment Service.

Keywords: Community participation, mangrove conservation, ecotourism.

PENDAHULUAN

Pesisir merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya dan memiliki potensi untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Hal ini diperkuat oleh Umayah *et al* (2016), daerah pesisir banyak dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas seperti pertambakan, perikanan, transportasi, pariwisata, dan kegiatan lainnya. Ekosistem mangrove mempunyai peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan, baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosial. Pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dapat dicapai jika mempertimbangkan seluruh aspek, baik aspek fisik maupun non fisik. Banyaknya *stakeholders* yang berkepentingan terhadap ekosistem mangrove berpotensi sebagai sumber konflik yang menyebabkan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan menjadi tidak efektif dan sering kali mengalami kegagalan. Kegagalan pengelolaan mangrove diindikasikan karena minimnya pelibatan masyarakat dan kebijakan manajemen yang bersifat *top down*. Pemerintah perlu memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan untuk turut berperan dalam upaya pengelolaan mangrove dan pengawasannya, juga untuk meminimalisir konflik yang menjadi penghambat dalam pengelolaan mangrove.

Pengembangan ekowisata selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 bahwa prinsip pengembangan ekowisata meliputi: (1) kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; (2) konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan ekowisata; (3) ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan; (4) edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggungjawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; (5) memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; (6) partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan (7) menampung kearifan lokal.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki kawasan ekowisata mangrove adalah Kabupaten Bulukumba. Kontribusi subsektor perikanan Kabupaten Bulukumba pada PAD dinyatakan cukup signifikan. Distribusi persentase PDRB Sub Sektor Perikanan berkontribusi sebesar 10,84% pada tahun 2017. Kontribusi ini merupakan terbesar ketiga setelah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 15,82% dan sub sektor tanaman pangan sebesar 14,48% (Pembukab Bulukumba, 2017). Hal ini memperlihatkan bahwa sub sektor perikanan memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah Kabupaten Bulukumba.

Kawasan ekowisata mangrove Kabupaten Bulukumba terdapat di Luppung Desa Manyampa, Kecamatan Ujungloe yang tengah dipersiapkan menjadi ekowisata percontohan secara nasional. Melalui perjalanan yang cukup panjang sejak diresmikan akhir tahun 2019, telah dijadikan sebagai objek kunjungan sempat menurun di tengah melonjaknya angka kasus Covid-19. Selama pandemi, Ekowisata Mangrove Luppung semakin rimbun dan menjadi tujuan favorit. Pohon mangrove mengalami pertumbuhan dengan semakin rindang, seakan memeluk pengunjung yang sedang berjalan dan berjarak di ekowisata itu (Media Indonesia, Februari 2021). Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu destinasi yang mulai diminati. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola, menjaga, dan melestarikan sumberdaya mangrove, agar kondisi alam maupun ekosistem pesisir tidak rusak. Partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan mangrove dengan sendirinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove di kawasan ekowisata Luppung Kabupaten Bulukumba, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pola pemanfaatan dan pemeliharaannya, termasuk analisis mengenai alternatif strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode survei melalui kuesioner, observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan responden penelitian menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu dengan *purposive sampling* yang meliputi masyarakat, pemilik usaha di kawasan ekowisata, dan pihak pemerintah. Kuesioner difokuskan untuk menggali pola partisipasi masyarakat dalam

konservasi mangrove di ekowisata Luppung yang meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pola pemanfaatan serta pemeliharaan. Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lapangan selanjutnya diseleksi sesuai kebutuhan dan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini merupakan gabungan antara teknik kuantitatif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan mangrove sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang ada di sekitarnya maupun yang tinggal jauh dari hutan mangrove. Pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem mangrove adalah dengan pembentukan Kelompok Tani Hutan. Kelompok tani hutan merupakan perkumpulan para petani tambak yang memiliki peranan penting dalam kelestarian ekosistem mangrove. Kelompok tani di Desa Manyampa adalah Kelompok Sipakatau sangat aktif terutama jika adanya kegiatan rehabilitasi mangrove, dalam hal ini penanaman bibit yang diadakan dari berbagai pihak seperti dinas lingkungan hidup maupun dari kegiatan mahasiswa. Masyarakat sekitar Ekowisata Mangrove Luppung, baik yang tergabung dalam kelompok tani maupun yang tidak bergabung memiliki antusias yang tinggi dalam memelihara mangrove, karena mereka mengetahui manfaat dari ekosistem mangrove terutama menahan ombak di pantai yang dapat merusak pertambakan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Sipakatau, yang mengemukakan dengan adanya ekosistem mangrove banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya menahan terjadinya kerusakan pada tambak yang disebabkan oleh ombak. Juga menjadi pertambahan pendapatan oleh masyarakat pesisir, dengan menyimpan bubu pada akar tanaman mangrove jika air sedang pasang, dan pada saat air sedang surut maka banyak ikan-ikan yang tertangkap dalam bubu tersebut. Namun demikian, masih ada juga warga mencabut bibit mangrove yang ditanam, dengan alasan mengganggu jalan keluar pada saat mengumpulkan rumput laut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba diperoleh informasi bahwa terdapat kegiatan rehabilitasi mangrove yang dipusatkan di Pesisir Kecamatan Ujung Loe, khususnya Desa Manyampa, kegiatan rehabilitasi tersebut melibatkan masyarakat sekitar. Untuk menciptakan pengelolaan yang serasi antara pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dengan lingkungan, maka salah satu arahan bagi pengembangan kawasan pesisir dan kelautan Kabupaten Bulukumba adalah upaya pelestarian

lingkungan dengan penanaman kembali hutan-hutan mangrove dan pelestarian terumbu karang terutama pada kawasan-kawasan yang rentan terhadap bahaya tsunami. Untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan pesisir dan kelautan Kabupaten Bulukumba, program pengembangan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengelola dan memelihara kelestarian mangrove dan terumbu karang.

Partipasi masyarakat dalam konservasi mangrove dikategorikan ke dalam dua bentuk partisipasi, yaitu pengelolaan ekowisata mangrove dan pemeliharaan ekosistem mangrove. Pengelolaan ekosistem mangrove meliputi 4 kriteria, yaitu pengetahuan, sosialisasi, penyuluhan, dan kerja sama. Pemeliharaan ekosistem mangrove memiliki 5 kriteria yaitu kepedulian, keterlibatan, keterampilan, pendapatan, dan kepercayaan. Hasil analisis terhadap partisipasi masyarakat tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Ekowisata Mangrove

Analisis mengenai pengelolaan ekosistem mangrove berdasarkan 4 kriteria yang telah disebutkan sebelumnya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove

No	Indikator	Skor	Kategori
1	Pengetahuan	4,3	Baik
2	Sosialisasi	3,1	Sedang
3	Penyuluhan	3,2	Sedang
4	Kerja sama	4,1	Baik
	Rerata	3,7	Sedang

Berdasarkan hasil analisis skala likert, pengetahuan masyarakat terkait keberadaan ekosistem mangrove adalah kategori baik. Dalam pemberdayaan masyarakat tentunya harus memiliki pengetahuan dasar atas apa yang akan dikembangkan kedepannya. Demikian pula dengan kelestarian ekosistem mangrove, tentunya pengetahuan dasar akan pengelolaan dan pemeliharaannya harus dimiliki oleh masyarakat yang akan diberdayakan. Pengetahuan masyarakat tidak diperoleh dari pendidikan formal, melainkan dari orang terdahulu dalam pelestarian ekosistem mangrove.

Kegiatan sosialisasi mengenai konservasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan 2 sampai 3

kali dalam setahun, yang diikuti oleh anggota Kelompok Tani Hutan yang ada di Kecamatan Ujung Loe. Melalui sosialisasi dan penyuluhan akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program pemeliharaan ekosistem mangrove.

Kegiatan penyuluhan sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan mangrove yang bertujuan menginformasikan kepada masyarakat bagaimana caranya untuk melakukan upaya pelestarian terhadap ekosistem mangrove tersebut, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat bekerjasama untuk melestarikan ekosistem mangrove secara bersama-sama dengan pemerintah atau masyarakat sekitar hutan tersebut. Berdasarkan hasil analisis skala likert, sosialisasi dan penyuluhan dalam pengelolaan hutan mangrove adalah kategori sedang.

Pengelolaan ekosistem mangrove harus dilakukan secara berkala dan konsisten antara Pemerintah Kabupaten beserta seluruh komponen masyarakat. Selain itu, keberadaan mangrove juga mampu mempererat silaturahmi dan gotong royong sesama warga. Melalui sistem pengelolaan yang berbasis kemasyarakatan, masyarakat dapat saling bekerjasama untuk menjaga dan mengelola keberadaan ekowisata mangrove demi kepentingan bersama. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat luar, keberadaan hutan mangrove Luppung juga berfungsi sebagai wisata alam dan menjadi objek penelitian dan pendidikan. Bagi masyarakat sekitar, ekowisata menjadi tempat melakukan perniagaan. Peluang usaha terbuka bagi masyarakat, berupa penjualan makanan, penjualan oleh-oleh khas mangrove, jasa foto, dan penyewaan property foto. Pada analisis skala likert, kerja sama dikategorikan baik.

2. Pemeliharaan Ekosistem Mangrove

Pemeliharaan ekosistem mangrove berdasarkan 5 kriteria yang pada tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Ekowisata Mangrove

No	Indikator	Skor	Kategori
1	Kepedulian	5	Baik
2	Keterlibatan	4,3	Baik
3	Keterampilan	3,2	Sedang

4	Pendapatan	5	Baik
5	Kepercayaan	5	Baik
	Rerata	4,5	Baik

Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan ekosistem mangrove di wilayah Ekowisata Luppung sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dari fungsi perlindungan itu sendiri. Kesadaran masyarakat juga merupakan hal yang harus ditumbuhkan demi terciptanya ekosistem mangrove yang lestari. Berdasarkan hasil analisis skala likert, keterlibatan dikategorikan sedang. Meskipun keterlibatan masyarakat sedang, akan tetapi keterlibatan masyarakat menjadi faktor pendukung pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemeliharaan ekosistem mangrove. Partisipasi masyarakat pada aspek pemeliharaan pada prinsipnya terbangun karena adanya motivasi utama untuk ikut berpartisipasi karena ekosistem mangrove bukan hanya sebagai penunjang perekonomian masyarakat, melainkan juga untuk menanggulangi terjadinya abrasi. Keterampilan masyarakat dalam upaya pemeliharaan ekosistem mangrove dikategorikan baik, sehingga keterampilan merupakan faktor pendukung pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemeliharaan ekosistem mangrove.

Manfaat ekonomis yang berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu sebagai sumber mata pencaharian penduduk melalui proses pemanfaatan hasil mangrove dan pendapatan dari usaha perniagaan kawasan ekowisata. Hutan mangrove yang difungsikan sebagai tempat wisata juga mendatangkan keuntungan bagi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan hasil analisis skala likert, pendapatan dikategorikan baik, sehingga pendapatan merupakan faktor pendukung pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemeliharaan ekosistem mangrove.

Banyak kerusakan yang akan terjadi jika ekosistem mangrove rusak, terutama menyebabkan abrasi pantai. Oleh karena itu, masyarakat mempercayai bahwa dengan adanya ekosistem mangrove dapat melindungi pantai dari abrasi yang dapat merusak tambak para petani. selain itu, ekowisata mangrove menjadi habitat berbagai spesies laut. Berdasarkan hasil analisis skala likert, kepercayaan dikategorikan baik, sehingga kepercayaan merupakan faktor pendukung pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemeliharaan ekosistem mangrove.

Hasil analisis data membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove relatif tinggi dari aspek perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan (restorasi). Strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove secara berkelanjutan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah dan lembaga pemerhati lingkungan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala terkait manfaat hutan mangrove.
2. Pemerintah telah membentuk kelompok tani dan kelompok pelestarian hutan mangrove serta rutin melakukan pembinaan.
3. Pemerintah bekerjasama dengan lembaga pemerhati lingkungan melakukan penanaman bibit bakau untuk menambah luas kawasan hutan mangrove.
4. Pada setiap momen hari besar seperti hari mangrove sedunia dan peringatan HUT RI, senantiasa dirangkaikan dengan penanaman bibit bakau yang dilakukan oleh pemerintah, kelompok pelestarian hutan mangrove, karang taruna, masyarakat, dan pemerhati lingkungan
5. Kerja sama antara *stakeholders* dalam pelestarian hutan mangrove yaitu pihak Pemerintah Desa, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan.
6. Meningkatkan keuntungan ekonomis hutan mangrove sebagai tempat wisata dan penelitian, juga tempat berkembang biak kepiting. Populasi kepiting yang terus bertambah membuat masyarakat pesisir lebih mudah menangkap kepiting untuk dikonsumsi dan sebagian lagi dijual.
7. Sejak 2018, kawasan hutan mangrove Luppung telah dikembangkan menjadi kawasan wisata. Ekowisata mangrove terus dikembangkan, baik jumlah luasan maupun penataan. Banyaknya kunjungan wisatawan memerlukan pelibatan masyarakat secara responsif dengan tetap menjaga kebersihan habitat mangrove dan kelestarian ekosistem di dalamnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove terhadap 4 kriteria pengelolaan ekosistem mangrove yaitu, pengetahuan, sosialisasi, penyuluhan, dan kerja sama memperoleh skor 3,7 dikategorikan sedang. Untuk pemeliharaan ekosistem mangrove terhadap 5 kriteria yaitu kepedulian, keterlibatan, keterampilan, pendapatan, dan kepercayaan memperoleh skor 4,5 dikategorikan baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove relatif tinggi dari aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (restorasi). Partisipasi masyarakat juga didukung oleh beberapa lembaga yang bekerja sama seperti Kelompok

Tani Hutan Mangrove, Karang Taruna, Pemerintah Desa Manyampa, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terlaksana dengan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik yang bersifat moral maupun material, sebagai berikut.

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, beserta jajarannya sebagai pihak yang mendanai penelitian dan penerbitan artikel ini.
3. Kepala Desa Manyampa, Perangkat Dusun Luppung, Kelompok Tani Hutan Mangrove Luppung, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulukumba, dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba.
4. Responden penelitian, yaitu masyarakat sekitar kawasan Ekowisata Mangrove Luppung.
5. Siswa SMA Negeri 1 Bulukumba dan Kelompok Karang Taruna yang membantu dalam pengumpulan data di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, Niharul; Suryono; dan Rudhi Pribadi. 2013. Konservasi Ekosistem Mangrove di Desa Pasarbanggi, Kabupaten Rembang. *Journal of Marine Research*. Vol. 2 No. 2. Hal. 55-64.
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 2017. *Profil Kecamatan Ujung Loe*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Ekowisata.
- Umayah, S., H.Gunawan, dan M. N. Isda. 2016. Tingkat Kerusakan Ekosistem Mangrove di Desa Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Riau Biologia*. 1 (4):24-30.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.